

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, Wawancara dan dokumentasi bahwa :

Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi belum optimal. Standar dan tujuan peraturan wali kota tersebut masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat karena adanya penekanan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Serta Dinas Kesehatan pun perlu menerapkan sistem transparan dalam pengelolaan dana dan program untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Dengan cara evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan standar layanan dipatuhi dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Meskipun Peraturan Walikota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan, masih terdapat kekurangan dalam detail dan implementasinya. Sehingga pengelolaan biaya kesehatan perlu terintegrasi dengan program JKN-KIS dan memerlukan rekomendasi dari RT/RW untuk memastikan keadilan. Meskipun pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bekasi dinilai baik, perlu adanya perbaikan agar lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya jaminan kesehatan daerah yang ada di Kota Bekasi masih belum mencukupi hal ini disebabkan oleh bergantungnya pada kerjasama antara semua pelaksana, kompetensi pegawai, penguat sarana dan pengelola sumber daya anggaran yang

efektif. Hal ini disebabkan karena sikap pelaksana fokus pada akurasi data, edukasi, kolaborasi antar lembaga dan evaluasi rutin akan sangat berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan jaminan kesehatan terutama untuk kelompok rentan agar lebih optimal.

Salah satunya penyebab kebijakan tidak berjalan secara optimal yaitu hambatan dalam pengimplementasian. Dalam upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter and Varn Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh standar dan tujuan dari isi kebijakan yang ada. Standar dan tujuan yang termuat dalam menjelaskan Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas sehingga implementasinya tidak maksimal karena tidak sesuai realitas yang ada. Selain itu pemahaman sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan juga merupakan hal yang penting sikap pelaksana kebijakan sudah memahami terkait standar dan tujuan dari Peraturan wali kota tersebut. Kemudian Van Metter and Van Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sumber daya, dalam hal ini sumber daya yang ada ikut memberikan pengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah yang ada karena keterbatasan sumber daya yang ada turut menjadi hambatan seperti pada keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tidak semua masyarakat mampu membayar jaminan

kesehatan yang bukan tanggungan APBD sendiri. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan karakteristik Organisasi Pelaksana dimana setiap stakeholder mencerminkan komitmen bersama dalam pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan daerah.

Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan dimana komunikasi antar stakeholder yang terlibat sudah terjalin cukup baik. Namun, upaya sosialisasi pada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa terdapat kebijakan pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan daerah. Kemudian Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sikap para pelaksana, belum optimalnya peraturan wali kota yang ada juga disebabkan oleh dukungan dari masyarakat serta kalaborasi antar lembaga yang masih kurang mengimplementasikan peraturan tersebut. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimana faktor eksternal ini turut memberikan manfaat nyata bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis paparkan sesuai dengan hasil penelitian penulis yang membahas mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penulis meyakini bahwa penelitian yang penulis angkat masih belum baik dan memuaskan. Penulis juga menyadari penelitian yang penulis angkat masih dalam ruang lingkup kecil, sehingga dalam dunia akademisi dan dinas social perlu adanya penelitian lebih lanjut agar :

1. Diharapkan untuk koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dapat diperkuat, sehingga upaya jaminan kesehatan

daerah menjadi lebih efektif dan inklusif agar semua masyarakat dapat merasakan LKM-NIK ini serta Koordinasi yang dilakukan lebih banyak dibangun oleh organisasi masyarakat sipil sendiri pada pemerintah bukan pemerintah yang merangkul organisasi masyarakat sipil.

2. Diharapkan infrastruktur kesehatan ini agar lebih optimal lagi dalam menjalankan implementasi program jaminan kesehatan daerah bagi keluarga tidak mampu, pemerintah harus lebih bijak menganalisis kebutuhan masyarakat dan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi pelopor dan pelapor.
3. Diharapkan pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Bekasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi keluarga tidak mampu. Agar Dinas sosial memprioritaskan anggaran khusus dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Dinas kesehatan kota bekasi tetap menjalankan pengembangan fasilitas, sarana, dana, dan yang kurang lainnya agar masyarakatselalunyaman.
4. Dengan standar dan tujuan yang jelas, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi keluarga tidak mampu di Kota Bekasi. Serta memperdalam mengenai implementasi Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi.